

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN *E-GOVERNMENT*, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (APIP) TERHADAP KORUPSI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Oleh

Febrina Handayani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) terhadap korupsi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan jumlah data observasi sebanyak 406 data pada periode 2020-2022. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Penerapan *e-government* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, sedangkan Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (KAPIP) tidak memiliki pengaruh terhadap korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian tambahan menunjukkan bahwa penerapan *e-government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia periode 2020-2022.

Kata Kunci: *E-Government*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Korupsi.

ABSTRACT**THE EFFECT OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION, GOVERNMENT
INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) AND THE CAPABILITY OF
GOVERNMENT INTERNAL CONTROL APPARATUS (APIP) ON
CORRUPTION IN DISTRICT / CITY GOVERNMENTS
IN INDONESIA****By****Febrina Handayani**

This study aims to determine the effect of e-government implementation, Government Internal Control System (SPIP), and Government Supervisory Apparatus Capability (APIP) on corruption in district/city local governments in Indonesia. This research is a quantitative study using secondary data taken from the Directory of Supreme Court Decisions, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Kemenpanrb), and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) with a total of 406 observational data in the period 2020-2022. The results showed that the application of e-government has a negative and significant effect on corruption in Regency / City Regional Governments in Indonesia. In contrast, the Government Internal Control System (SPIP) and the Capability of Government Internal Supervisory Apparatus (KAPIP) variables do not influence corruption in Regency / City Regional Governments in Indonesia. Based on the results of additional testing, show that the application of e-government, the Government's Internal Control System, and the Capability of the Government's Internal Supervisory Apparatus have a negative and significant effect on corruption in Regency / City Regional Governments in Indonesia for the 2020-2022 period.

Keywords: E-Government, Government Internal Control System, Government Internal Control Apparatus, Corruption.